



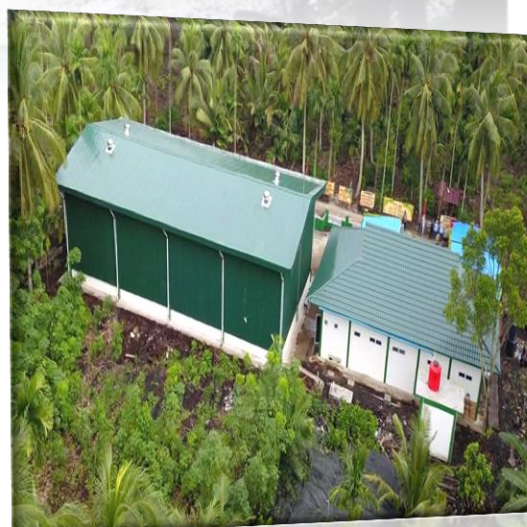
LKjIP 2021

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2021

DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM



Sentra IKM Sagu



Sentra IKM Kopi

**Jl. Dorak, Komplek Perkantoran Terpadu No. 07
Kel. Selatpanjang Timur, Kec. Tebing Tinggi
Kabupaten Kepulauan Meranti – 31644
E-Mail : program.dagperinkopmeranti@gmail.com**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKjIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2021 sebagaimana Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas.

Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Perjanjian Kinerja, sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing masing Bagian sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dengan tersusunnya dokumen ini, diucapkan terimakasih kepada tim penyusunan LKjIP Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM serta para pelaksana kegiatan serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Harapan kita semua tentunya penyusunan LKjIP Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Tahun 2021 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM di tahun selanjutnya serta

dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi-misi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM serta visi – misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Demikian, semoga dokumen LKjIP Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Tahun 2020 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Aamiin.

Selatpanjang, 04 Januari 2022
**Plt. Kepala Dinas Perdagangan
Perindustrian Koperasi dan UKM
Kabupaten Kepulauan Meranti,**



MARWAN, SE

Penata Tk. I

NIP. 19690808 199403 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Satuan Kerja Perangkat Daerah	2
1.3. Tugas dan Fungsi	4
1.4. Isu Strategis	8
1.5. Landasan Hukum	10
1.6. Sistematika Penulisan	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
2.1 Rencana Strategis	12
2.2 Indikator Kinerja Utama	15
2.3 Perjanjian Kinerja	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja.....	19
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama.....	21
3.3 Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis ...	23
3.4 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD.....	57
3.5 Akuntabilitas Keuangan.....	59
BAB IV PENUTUP	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Isu Strategis Terkait Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM di Kabupaten Kepulauan Meranti	8
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	15
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama	16
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja	17
Tabel 3.1	Prediket Pencapaian Kinerja Tahun 2021	20
Tabel 3.2	Kategori Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2021.....	20
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Utama	22
Tabel 3.4	Capaian Indikator Kinerja	23
Tabel 3.5	Pencapaian Kinerja Sasaran	24
Tabel 3.6	Pencapaian Target Misi	24
Tabel 3.7	Kategori, Pencapaian Indikator Sasaran	25
Tabel 3.8	Analisis Pencapaian Sasaran 1	26
Tabel 3.9	Program, Kegiatan, anggaran dan output yang dihasilkan	28
Tabel 3.10	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja Pelayanan Aparatur	31
Tabel 3.11	Analisis Pencapaian Sasaran 2	32
Tabel 3.12	Program, Kegiatan, anggaran dan output yang dihasilkan	34
Tabel 3.13	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Tersedianya Sarana dan Prasarana Sentra Produksi Komoditas Lokal	37
Tabel 3.14	Analisis Pencapaian Sasaran 3	39
Tabel 3.15	Program, Kegiatan, anggaran dan output yang dihasilkan	43
Tabel 3.16	Tingkat Efektifitas dan efisiensi kinerja sasaran Tersedianya Sarana dan Prasarana Pusat – pusat Perniagaan	46
Tabel 3.17	Analisis Pencapaian Sasaran 4	47
Tabel 3.18	Program, Kegiatan, anggaran dan output yang dihasilkan	48
Tabel 3.19	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Sasaran Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	50
Tabel 3.20	Analisis Pencapaian Sasaran 5	51

Tabel 3.21	Program Kegiatan, Anggaran, dan Output yang dihasilkan	52
Tabel 3.22	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Berkembangnya Usaha Mikro Kecil Menengah	55 56
Tabel 3.23	Pagu dan Realisasi Anggaran	57
Tabel 3.24	Laporan Realisasi Anggaran dan Capaian Program/Kegiatan	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kepulauan Meranti yang mempunyai tugas untuk membantu Kepala Daerah dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM berkewajiban menyampaikan laporan berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan dan program selama kurun waktu 2021.

Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban (LKjIP) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 dibuat untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam upaya menuju pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan sebagai bahan evaluasi kinerja SKPD agar dapat melaksanakan kinerja yang lebih baik, efektif dan efisien baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya diwaktu yang akan datang.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 GAMBARAN UMUM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas memimpin

dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM.

Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti ditetapkan selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Berdasarkan tugas Pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Ditariknya kembali kewenangan pengawasan terhadap barang yang beredar dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga pengawasan terhadap barang yang beredar di Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. Disparitas Harga Barang dan Jasa di tiap-tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti, akibat biaya mobilisasi yang tinggi;
3. Kegiatan Takar, Ukur yang dapat menjamin kualitas dan kuantitas barang yang dijual dan diedarkan di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti yang belum memadai;
4. Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti, belum memiliki market yang baik dipasar Nasional maupun Pasar Internasional;
5. Belum Optimalnya Keberpihakan Pemerintah Terhadap Koperasi yang ada saat ini;
6. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utama-nya;
7. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

8. Informasi tentang potensi penanaman modal dan peluang investasi di Kabupaten Kepulauan Meranti belum akurat dan tersedia secara optimal;
9. Iklim investasi di Kabupaten Kepulauan Meranti yang masih belum kondusif.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Mempunyai Tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dibidang Perdagangan dan Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi dibidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usah Kecil Menengah.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti didukung oleh seorang Kepala Dinas, 1 Sekretaris, 4 Kepala Bidang yang meliputi Sekretariat, Bidang Perdagangan, bidang Bidang Perindustrian, Bidang Koperasi dan UKM, serta Bidang Metrologi Legal.

1.3. TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti adalah lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang melaksanakan urusan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten

Kepulauan Meranti diatur dalam Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut di atas, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari :

1. Kepala Dinas;

Kepala Dinas mempunyai tugas :

Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai rincian tugas mengkoordinasikan bidang-bidang, perumusan, Umum, Kepegawaian, perencanaan program, evaluasi, pelaporan dan administrasi Keuangan dan Perlengkapan.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. membuat rencana kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja
- b. menyusun rencana dan program kegiatan kesekretariatan;
- c. melaksanakan pelayanan Administrasi Kesekretariatan Dinas yang meliputi Bagian Umum, Kepegawaian, Program, keuangan dan perlengkapan;
- d. melaksanakan pengawasan urusan keuangan dengan meneliti laporan yang dibuat oleh akuntan agar pengeluaran anggaran sesuai rencana;
- e. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Sekretariat terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Perencanaan Program,
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
- 3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

3. Bidang Perdagangan.

Bidang Perdagangan mempunyai tugas merumuskan, menyusun perencanaan dan kebijakan teknis operasional penataan, pembinaan dan pengembangan perdagangan yang menjadi kewenangan daerah, dengan rincian.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Perdagangan mempunyai rincian tugas:

- a. Perencanaan dan pelaporan dalam rangka penataan usaha perdagangan dan pasar;
- b. Pembinaan dan pengembangan di bidang perdagangan dan pasar;
- c. Penyusunan teknis pelaksanaan penataan, pembinaan dan pengembangan perdagangan dan pasar;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan, penataan, pembinaan dan perdagangan daerah;
- e. Pembinaan dan perumusan pengetahuan kemampuan teknik manajemen pengusaha dalam melaksanakan kegiatan perdagangan dan persaingan usaha standarisasi;
- f. Pembinaan dan perumusan bimbingan usaha pengembangan impor dan ekspor;
- g. Pembinaan, perumusan, pengarahan dan penyuluhan terhadap dunia usaha perdagangan dan peningkatan mutu serta menunjang hasil produk usaha kecil dan menengah supaya berorientasi ekspor;
- h. Penyiapan teknik pendidikan standar mutu kepada dunia usaha;
- i. Pembinaan, perumusan dan penyiapan bahan penyuluhan bimbingan teknis penggunaan bahan baku dan bahan penolong dalam peningkatan bidang perdagangan;
- j. Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi dalam memonitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan dan penetapan kesepakatan;
- k. Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, memonitoring dan evaluasi sarana perdagangan modern dan sarana penunjang perdagangan skala lokal; dan
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Perdagangan, terdiri dari:

- 1) Seksi perdagangan dalam negeri, luar negeri dan pendaftaran perusahaan;
- 2) Seksi sarana dan usaha perdagangan; dan
- 3) Seksi pasar dan retribusi pasar.

2. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, rencana program kerja, bahan bimbingan teknis dan pengendalian administrasi teknis di bidang perindustrian.

Bidang Perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan dibidang industri;
- b. Penetapan bidang industri prioritas dan unggulan;
- c. Pemberian pelayanan teknis terhadap kelancaran pengadaan dan penanganan bahan baku maupun penolong;
- d. Promosi produk industri;
- e. Penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi bidang industri;
- f. Pemberian fasilitas dan pengawasan standarisasi;
- g. Penerapan standar kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) industri dan pembina industri;
- h. Pemberian fasilitas kemitraan dan kerjasama;
- i. Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta industri kreatif;
- j. Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap industri;
- k. Pembinaan dan pembentukan kelembagaan bidang industri;
- l. Penyusunan tata ruang industri;
- m. Pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri;
- n. Pendataan, analisis dan desiminasi data industri;
- o. Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang industri;

- p. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Perindustrian, terdiri dari:

- 1) Seksi agro dan kimia;
- 2) Seksi industri logam, mesin, elektronika, aneka dan kerajinan;
- 3) Seksi pengembangan perwilayahan

1.4. ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam hal Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut:

Tabel. 1.1
Isu Strategis Terkait Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM
Kabupaten Kepulauan Meranti

No.	Aspek	Isu Strategis
1.	Koordinasi	1. Perdagangan Lintas Batas Antar wilayah dari Luar Negeri, yang saat ini masih meninggalkan persoalan, akibat diberlakukannya UU No. 23 Tentang Pemerintahan Daerah, dengan ditariknya kewenangan Pemerintah Daerah, Terkait Pengawasan terhadap Barang-Barang yang Beredar. Namun Pengawasan dari Pemerintah Pusat dan Propinsi, masih tergolong lemah.
		2. Disparitas Harga yang persentasenya masih tergolong Tinggi
2.	Sistem Pengelolaan data	3. Belum optimalnya sistem pengelolaan Data untuk memfasilitasi Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam mengembangkan Hasil
		4. Fasilitasi Pengelolaan dan pemanfaatan data yang Belum Mendapat Perhatian khusus oleh Pemerintah Daerah
		5. Belum terkelolanya sumber data dan informasi
		6. Masih kurangnya dokumen hasil kajian dan regulasi yang ada
3.	Sumber daya manusia	7. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utama-nya;
		8. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

1.5. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan LKjIP Dinas, Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 51 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

11. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.

1.6. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pada prinsipnya Laporan Kinerja ini menguraikan pencapaian kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti selama kurun waktu tahun 2021. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja dan penetapan kinerja dapat ditarik kegagalan yang ada untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Dengan demikian maka sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi OPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban Tahun 2021 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti. Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti yang ditetapkan dengan periode dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021. Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016-2021.

Penyusunan Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan

Meranti Tahun 2016-2021 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kepulauan Meranti sebagai **“Menjadikan Kepulauan Meranti Sebagai Kawasan Niaga Yang Maju Dan Unggul Dalam Tatanan Masyarakat Madani”**.

Visi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016-2021 adalah:

“TERWUJUDNYA PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA YANG DIDUKUNG OLEH INDUSTRI, KOPERASI YANG MAPAN, GUNA MENUNJANG EKONOMI KERAKYATAN MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA”

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016-2021 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana IKM, UMKM, perdagangan dan Metrologi;
2. Mewujudkan kemandirian industri kecil dan menengah serta menumbuhkan wirausaha baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi lokal dengan penerapan teknologi tepat guna.
3. Meningkatkan tata kelola dan daya saing koperasi serta UMKM.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016-2021 sebanyak lima sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun Ke					
				Kondisi awal	Th-1	Th -2	Th -3	Th -4	Th -5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan Pelayanan Pemerintah yang Baik	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70	75	80	85	90	90
2.	Mengembangkan Sentra Produksi Komoditas Perniagaan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Sentra Produksi Komoditas Lokal	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Komoditas Lokal	0	0	33.3	66.7	90	100
3.	Menyediakan Sarana dan Prasarana Hulu-hilir Kawasan Niaga	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pusat-pusat Perniagaan	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Pusat-Pusat Perniagaan yang beroperasi dengan Baik	0	60	62	65	67	75
4.	Menumbuh Kembangkan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	30	35	36	38	40	45
		Berkembangnya Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Pertumbuhan UMKM Aktif	3	6	9	12	15	18

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA	
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Mengoptimalkan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan dengan Aparatur yang Propesional	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur Yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) selama satu tahun yang diikuti minimal 50% penerima layanan dengan membandingkan total dari nilai persepsi per variable dengan total variable yang terisi dikalikan dengan nilai penimbang. Terdapat 14 (empat belas) variable sesuai dengan acuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan IndeksKepuasan Masyarakat
2	Tersedianya Sarana dan Prasarana Sentra Produksi Komoditas Lokal	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Komoditas Lokal	%	Untuk mendukung pencapaian misi ke dua RPJMD yaitu mewujudkan Kawasan Niaga	$\% \frac{\text{Jumlah Sarana dan Prasarana Produksi Komoditas Lokal}}{\text{Total Sarana dan Prasarana Komoditas Lokal}} \times 100$	Dinas, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam Rangka Peningkatan Sarana dan Prasarana Komoditas Lokal dengan cara Pembangunan Sentra Industri.
3	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pusat-pusat Perniagaan	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Pusat-Pusat Perniagaan yang beroperasi dengan Baik	%	Untuk mendukung pencapaian misi ke dua RPJMD yaitu mewujudkan Kawasan Niaga	$\frac{X0 - X1}{X0} \times 100 \%$	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	Peningkatan Sarana dan Prasana Pusat-pusat perniagaan bertujuan agar geliat Perdagangan di Kabupaten Kepulauan Meranti benar-benar tumbuh subur sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi baik dan Misi dalam mewujudkan kawasan niaga benar-benar dapat dicapai.
4	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	%	Koperasi menjadi solusi masyarakat dalam mengembangkan aktifitas ekonomi yang merata	$\frac{\text{Jumlah koperasi Sehat}}{\text{Total seluruh koperasi}} \times 100 \%$	Dinas, Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan UKM	Koperasi Sehat yaitu: 1. Memiliki pengurus 2. Ada laporan keuangan 3. Ada RAT

5.	Berkembangnya Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Pertumbuhan UMKM Aktif	%	Pertumbuhan ekonomi saat ini juga dipengaruhi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	$\frac{X_1 - X_0}{X_0} \times 100 \%$	Dinas, Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan UKM	Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Daerah.
----	--	-----------------------------------	---	--	---------------------------------------	--	--

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian,
Koperasi dan UKM Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90
2.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Sentra Produksi Komoditas Lokal	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Komoditas Lokal	100
3.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pusat-pusat Perniagaan	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Pusat-Pusat Perniagaan yang beroperasi dengan Baik	75
4.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	45
5.	Berkembangnya Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Pertumbuhan UMKM Aktif	18

Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1.03.01.2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.215.362.147	APBD
2.17.03.2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	92.431.600	APBD
2.17.07.2	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	49.999.800	APBD
2.17.08.2	Program Pengembangan UMKM	1.599.999.700	APBD
3.30.03.2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	369.278.050	APBD
3.30.06.2	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	126.024.932	APBD
3.30.07.2	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	221.156.800	APBD
3.31.02.2	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	5.232.637.630	APBD/APBN
JUMLAH		Rp. 12.906.890.659,-	

Selatpanjang, 04 Januari 2021

**Plt. KEPALA DINAS PERDAGANGAN,
PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN
UKM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

MARWAN, SE
Penata Tk.I
NIP. 19690808 199403 1 006

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel 3.1. Predikat Pencapaian Kinerja

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut

Tabel 3.2. Kategori Pencapaian Kinerja Sasaran

NO.	Kategori	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2021, telah ditetapkan 5 (Lima) sasaran dengan 5 (Lima) indikator kinerja (*out comes*) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan *Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran

keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2021 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Tahun 2020	Target 2021	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	87.3	90	86,03	95,6 %
2	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Komoditas Lokal	%	85.5	100	95	95 %
3	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Pusat-Pusat Perniagaan yang beroperasi dengan Baik	%	63.6	75	70	93.3 %
4	Persentase Koperasi Sehat	%	38.8	45	41	91.1 %
5	Persentase Pertumbuhan UMKM Aktif	%	14.5	18	16	88.8 %

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa semua capaian kinerja memenuhi target atau termasuk dalam kategori baik dengan range kisaran 75.00–89.99 meski tidak mencapai nilai 100%. Ditunjukkan pada indikator Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian kinerja 95,6%, indikator Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Komoditas Lokal dengan capaian kinerja 95%, Indikator

Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pusat Pusat Perniagaan yang Beroperasi Dengan Baik dengan capaian kinerja 93,3%, indikator Persentase Koperasi Sehat dengan capaian kinerja 91,1%, dan indikator Persentase Pertumbuhan UMKM Aktif dengan capaian 88.8%.

3.3 Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016 - 2021. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 - 2021 sebanyak 5 (Lima) sasaran.

Tahun 2021 adalah tahun Kelima pelaksanaan Rencana Strategis. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM dari 5 (Lima) sasaran strategis dengan 5 (Lima) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4.

**Capaian Indikator Kinerja
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun 2021**

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	90	86,03	95,6 %
2	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Komoditas Lokal	%	100	95	95 %
3	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Pusat-Pusat Perniagaan yang beroperasi dengan Baik	%	75	70	93.3 %
4	Persentase Koperasi Sehat	%	45	41	91.1 %
5	Persentase Pertumbuhan UMKM Aktif	%	18	16	88.8 %

Berdasarkan pengukuran kinerja di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM pada beberapa tabel berikut:

Tabel 3.5
Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Capaian
1	Melebihi/Melampaui Target	>100
2	Sesuai Target	= 100
3	Tidak Mencapai Target	<100

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:
Dari 5 (Lima) Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.6
Pencapaian Target Misi

No.	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1 Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana IKM, UKM, Perdagangan dan Metrologi;	1					1	95.6
		1					1	95
2	Misi 2 Mewujudkan Kemandirian Industri Kecil dan Menengah serta menumbuhkan Wirausaha baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi lokal.	1					1	95.5
3	Misi 3 Meningkatkan Tata Kelola dan Daya Saing Koperasi serta UKM;	2					2	91.1 88.8

Dari 5 (Lima) sasaran dengan 5 (Lima) indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.7
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase
A.	Misi 1		
1	Melebihi/Melampaui Target		
2	Sesuai Target		
3	Tidak Mencapai Target	2	95.6 dan 95
B.	Misi 2		
1	Melebihi/Melampaui Target		
2	Sesuai Target		
3	Tidak Mencapai Target	1	95.5
C.	Misi 3		
1	Melebihi/Melampaui Target		
2	Sesuai Target		
3	Tidak Mencapai Target	2	91.1 dan 88.8

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain:

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2021 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 5 Sasaran dan 5 indikator kinerja dari 3 misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti 2016 - 2021, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

a. Sasaran 1: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Aparatur

Pencapaian sasaran pertama dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Aparatur

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%	Tahun 2022	%
			Target	Realisasi		Target	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	90	86.03	95.6		
Rata-rata Capaian Kinerja					95.6		

Sasaran Meningkatnya Kinerja Pelayanan Aparatur terdiri dari 1 (satu) indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Capaian kinerja nyata indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah sebesar 86.03 dari target sebesar 90 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, sehingga Nilai capaian kinerjanya adalah 95.6%.

Tahun 2021 adalah tahun Kelima renstra, capaian tahun 2021 sebesar 86.03 bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas maka capaian kinerjanya mencapai nilai 95.6%.

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kinerja Pelayanan Aparatur didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan pemberian rekomendasi perizinan dan penerbitan SKA yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan melalui survei secara langsung terhadap setiap pemohon rekomendasi perizinan. Survei indeks kepuasan masyarakat meliputi 12 unsur yang relevan, valid, dan reliabel, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat sebagai pengembangan dari prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebagai berikut :

Gambar Evidence Survei IKM

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9

Program, Kegiatan, Anggaran dan Output yang Dihasilkan

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Menunjang / Kurang
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	• Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Administrasi Keuangan Perangkat Daerah • Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	70.000.000 3.449.322.569 34.999.850 469.973.900 89.460.000 1.050.108.828 51.497.000	70.000.000 2.990.025.857 34.999.850 340.578.196 9.460.000 877.326.644 39.593.600	Persentase ketersediaan perangkat pendukung pelayanan administrasi perkantoran	Menunjang

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Pelayanan Aparatur dengan, faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

- Faktor pendukung:
 1. Tersedianya Sarana dan Prasarana Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang berfungsi dalam menunjang kegiatan perkantoran.
 2. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang merupakan kunci dasar atas keberhasilan suatu Pekerjaan
- Faktor Penghambat:

Terjadi penurunan kemampuan anggaran dalam beberapa tahun

terakhir sehingga pembinaan serta pelatihan dalam peningkatan Sumber Daya Manusia semakin berkurang, namun target yang telah ditetapkan di dalam Renstra OPD tetap tercapai.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kinerja Pelayanan Aparatur, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.10
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja Pelayanan Aparatur

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan				
					Target	Realisasi	(%)	Program		Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Aparatur	1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	90	86.03	95.6	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.215.363.047	1.315.335.444	83.64%
		RATA-RATA CAPAIAN DARI INDIKATOR					95.6	TOTAL PER SASARAN		5.215.363.047	4.361.984.147	83.64%
TINGKAT EFISIENSI 16.36%												
TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u> 83.64%												

Berdasarkan tabel 3.10 menunjukkan penilaian rata-rata capaian indikator dalam menunjang sasaran pertama (1) adalah 95.6%, yaitu kriteria penilaian realisasi kinerja yang tergolong kategori tinggi. Artinya pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Tingkat efisiensi 16,36% menunjukkan selisih persentase realisasi kinerja capaian sasaran Meningkatnya Kinerja Pelayanan Aparatur melebihi persentase dari realisasi anggaran. Kurang selaras dengan tingkat efektifitas 83.64% menunjukkan persentase capaian kinerja lebih besar jika dibandingkan persentase realisasi anggaran program kegiatan.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kinerja Pelayanan Aparatur, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

- 1. Agar Capaian Kinerja Efektifitas Melebihi dari sebelumnya.
- 2. Mengikuti Pelatihan dan Bimtek yang berhubungan dengan Peningkatan SDM Aparatur

b. Sasaran 2 : Tersedianya Sarana dan Prasarana Sentra Produksi Komoditas Lokal

Pencapaian sasaran 2 (kedua) dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.11
Analisis Pencapaian Sasaran 2

Tersedianya Sarana dan Prasarana Sentra Produksi Komoditas Lokal

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%	Tahun 2022	%
			Target	Realisasi		Target	
1	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Komoditas Lokal	%	100	95	95	-	-
Capaian Kinerja					95		-

Sasaran Tersedianya Sarana dan Prasarana Sentra Produksi Komoditas Lokal dapat dilihat dari indikator Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Komoditas Lokal.

Capaian kinerja nyata indikator Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Komoditas Lokal adalah sebesar 95 dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, sehingga Nilai capaian kinerjanya adalah 95%. Hal ini didukung dengan kegiatan inti dari Peningkatan Sarana dan Prasarana Komoditas Lokal didukung oleh Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan kegiatan Pembangunan Sentra IKM Kopi dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Foto Sentra IKM Kopi di Desa Kedabu Rapat Kecamatan Rangsang Pesisir



Peresmian Sentra IKM Kopi di Desa Kedabu Rapat Kecamatan Rangsang Pesisir





Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12
Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Menunjang /Kurang
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	5.232.637.630	4.394.241.636	Persentase Sentra Industri Potensial yang dikembangkan	Menunjang

Keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja sasaran Tersedianya Sarana dan Prasarana Produksi Komoditas Lokal disebabkan faktor pendukung dan penghambat direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan secara intensif bagi pengawas, pengurus dan anggota IKM dan Wirausaha.
2. Menjalin kerjasama dengan Perbankan dalam memperkuat permodalan IKM dan Wirausaha
3. Melakukan sosialisasi dan bimtek tentang IKM dan Wirausaha.

➤ Faktor pendukung :

1. Tersedianya Lahan yang disediakan oleh Masyarakat untuk Pembangunan Sentra IKM
2. Tersedianya Bahan Baku
3. Tersedianya anggaran untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap IKM dan Wirausaha.

➤ Faktor Penghambat

1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya IKM dan Wirausaha.
2. Kegiatan Utama dari Sasaran Tersedianya Sarana dan Prasarana Produksi Komoditas Lokal baru dibangun di 2 (dua) lokasi yaitu Sentra IKM Sagu di Kec. Tebing Tinggi Timur, dan Sentra IKM Kopi di Kec. Rangsang Pesisir,

sementara untuk kecamatan lain belum ada, sementara wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan wilayah yang terdiri dari beberapa pulau. Dan untuk mobilisasi bahan baku dari kecamatan lain sangat tinggi. Dan diharapkan untuk tahun berikutnya juga akan dibangun sentra IKM untuk seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti secara bertahap sesuai dengan apa yang sudah tertuang di dalam Perda RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten)

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran Terwujudnya Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Kepulauan Meranti dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.13

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Tersedianya Sarana dan Prasarana Sentra Produksi Komoditas Lokal

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan				
					Target	Realisasi	(%)	Program		Pagu	Realisasi	%
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Sentra Produksi Komoditas Lokal	1.1	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Komoditas Lokal	%	100	95	95	1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	5.232.637.630	4.394.241.636	83,97
		RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR					95	TOTAL PER SASARAN		5.232.637.630	4.394.241.636	83,97
TINGKAT <u>EFISIENSI</u> 83.97%												
TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u> 16.03%												

Berdasarkan tabel 3.13 menunjukkan penilaian rata-rata capaian indikator dalam menunjang sasaran kedua (2) kurang selarasnya tingkat efektifitas 16.03% dengan tingkat efisiensi 83.97%. Hal tersebut terjadi karena adanya pemangkasan anggaran akibat rasionalisasi.

Sasaran 3 : Tersedianya Sarana dan Prasarana Pusat – pusat Perniagaan.

Pencapaian Sasaran Tersedianya Sarana dan Prasarana Pusat-pusat Perniagaan didukung oleh Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan yang berisi kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen yang berisi Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera-tera Ulang dan Pengawasan. Serta Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri yang berisi kegiatan Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Pencapaian sasaran 3 (Tiga) dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.14
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pusat-pusat Perniagaan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%	Tahun 2022	%
			Target	Realisasi		Target	
1	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Pusat-Pusat Perniagaan yang beroperasi dengan Baik	%	75	70	93.3	-	-
Capaian Kinerja					93.3		

Salah Satu Pusat Perniagaan yang Ada di Selatpanjang, Pasar Modern



Kegiatan Bidang Metrologi
Pelaksanaan Tera Ulang Timbangan



Pelaksanaan Tertib Takar di salah satu SPBU



Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.15
Program, Kegiatan, Anggaran dan Output yang dihasilkan

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Menunjang /Kurang
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	369.278.050	336.884.450	Terlaksananya Keamanan dan Ketertiban Pasar di Kabupaten Kepulauan Meranti	Menunjang
2.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	1. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera-tera Ulang Dan Pengawasan	126.024.932	103.386.900	Persentase Sarana Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Dalam Kondisi Baik	Menunjang
3.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	1. Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	221.156.800	193.421.500	Persentase Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Menunjang

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran Tersedianya Sarana dan Prasarana Pusat-pusat Perniagaan disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

- Faktor pendukung :
1. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pemantauan ekspor dan impor serta sembako seperti kendaraan air speedboat dan kendaraan operasional roda empat.
 2. Mengusulkan dibangun pos-pos perdagangan lintas batas pada wilayah-wilayah strategis
 3. Mengusulkan pembangunan pasar yang lebih baik dan modern

➤ Faktor Penghambat:

Terjadi penurunan kemampuan anggaran dalam beberapa tahun terakhir sehingga pembangunan fasilitas perdagangan terhambat, serta pembinaan bagi pedagang berkurang.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran Meningkatnya Usaha Perdagangan di Kabupaten Kepulauan Meranti, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.16

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Tersedianya Sarana dan Prasarana Pusat – pusat Perniagaan

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan				
					Target	Realisasi	(%)	Program		Pagu	Realisasi	%
1.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pusat – pusat Perniagaan	1.1	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Pusat-Pusat Perniagaan yang beroperasi dengan Baik		75	70	93.3	1.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	369.278.050	336.884.450	91.2
								2.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	126.024.932	103.386.900	82,1
								3.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	221.156.800	193.421.500	87.5
		RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR						93.3	TOTAL PER SASARAN		716.459.782	633.692.850
TINGKAT <u>EFISIENSI</u> 11.55 %												
TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u> 88,45 %												

Berdasarkan tabel 3.16 menunjukkan penilaian rata-rata capaian indikator dalam menunjang sasaran ketiga (3) kurang selarasnya tingkat efektifitas 88.45% dengan tingkat efisiensi 11.55%.

c. Sasaran 4: Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas kelembagaan Koperasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.17
Analisis Pencapaian Sasaran 4
Meningkatnya Kualitas kelembagaan Koperasi.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%	Tahun 2022	%
			Target	Realisasi		Target	
1.	Persentase Jumlah Koperasi Sehat	%	45	41	91.1	-	-
Rata-rata Capaian Kinerja					91.1		

Sasaran Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi terdiri dari 1 (Satu) indikator yaitu Persentase Koperasi Sehat.

Capaian indikator kinerja Persentase Koperasi Sehat adalah 41 dari target yang ditetapkan sebesar 45 seperti yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 91.1% atau belum mencapai target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi didukung oleh Program Pegawasan dan Pemeriksaan Koperasi. Output program dan kegiatan tersebut antara lain Terwujudnya Koperasi Sehat yang berdaya saing, dimana *output* tersebut menunjang pencapaian kinerja sasaran.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.18
Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Menunjang /Kurang
1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaanya Dalam Daerah Kab/Kota	92.431.600	91.606.300	Persentase Koperasi Sehat	Menunjang

Kegiatan penyuluhan dan pembinaan Koperasi se-Kabupaten Kepulauan Meranti





Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas kelembagaan koperasi disebabkan faktor penghambat sebagai berikut :

➤ Faktor Penghambat

1. Masih kurangnya pelatihan di bidang Koperasi, seperti pelatihan yang berhubungan dengan deversifikasi produk baru, pengembangan produk unggulan, penggunaan kemasan yang menarik maupun pemasaran produk dan masih kurangnya SDM yang memiliki keahlian Koperasi.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pembinaan dan tata kelola kelembagaan Koperasi dan UKM, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.19
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan				
					Target	Realisasi	(%)	Program		Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kualitas kelembagaan koperasi	1	Persentase Koperasi Aktif.	%	45	41	91.1	1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	92.431.600	91.606.300	99.11
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR					91.1	TOTAL PER SASARAN		92.431.600	91.606.300	99.11
TINGKAT <u>EFISIENSI</u> 0.89 %												
TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u> 99.11 %												

Berdasarkan tabel 3.19 menunjukkan penilaian rata-rata capaian indikator dalam menunjang sasaran keempat (3) adalah 91.1%, yaitu kriteria penilaian realisasi kinerja yang tergolong tinggi. Artinya pencapaian/realisasi kinerja capaian sudah memenuhi persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Penilaian rata-rata capaian indikator dalam menunjang sasaran keempat (4) dengan Tingkat efisiensi 0.89% dan Tingkat Efektifitas 99.11%.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas kelembagaan Koperasi, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

- 1. Melaksanakan berbagai pelatihan, seminar dan workshop guna meningkatkan pengetahuan, inovasi dan kreasi bagi Koperasi
- 2. Mengusulkan diadakannya tenaga penyuluh Koperasi di Kabupaten Kepulauan Meranti.

e. Sasaran 5 : Berkembangnya Usaha Mikro Kecil Menengah.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran Berkembangnya Usaha Mikro Kecil Menengah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.20
Analisis Pencapaian Sasaran 5
Berkembangnya Usaha Mikro Kecil Menengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Tahun 2021	%
			Target	Realisasi		Target	
1.	Persentase Pertumbuhan UMKM Aktif	%	18	16	88.8	-	-
Rata-rata Capaian Kinerja					88.8		

Sasaran Berkembangnya Usaha Mikro Kecil Menengah terdiri dari 1 (Satu) indikator yaitu Persentase Pertumbuhan UMKM Aktif

Capaian indikator kinerja Persentase Pertumbuhan UMKM Aktif adalah 16 dari target yang ditetapkan sebesar 18 sebagaimana yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 88.8% atau belum mencapai target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja sasaran Berkembangnya Usaha Mikro Kecil Menengah didukung oleh Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) dengan Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perizinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan serta Program Pengembangan UMKM dengan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil. Output program dan kegiatan tersebut antara lain Persentase UMKM Yang Mendapatkan Pelatihan dan Persentase UMKM yang Berkembang, dimana *output* tersebut menunjang pencapaian kinerja sasaran.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, *output* serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.21
Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Menunjang /Kurang
1	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perizinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	49.999.800	40.904.600	Persentase UMKM yang Mendapatkan Pelatihan	Menunjang
2	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1.599.999.700	487.362.000	Persentase UMKM yang Berkembang	Menunjang

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran Berkembangnya Usaha Mikro Kecil Menengah disebabkan faktor penghambat sebagai berikut :

- Faktor Penghambat adalah :
1. Masih terbatasnya modal usaha dalam meningkatkan perkembangan UMKM agar menjadi lebih maju.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Berkembangnya Usaha Mikro Kecil Menengah, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Memberikan bantuan modal usaha kepada UMKM melalui kerjasama dengan pihak Bank melalui dana KUR ataupun Dana CSR.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran Berkembangnya Usaha Mikro Kecil Menengah, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.22

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Berkembangnya Usaha Mikro Kecil Menengah

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan				
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%	
1	Berkembangnya Usaha Mikro Kecil Menengah	1 . Persentase Pertumbuhan UMKM Aktif	%	18	16	88.8	1 Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro	49.999.800	40.904.600	81.8	
							Program Pengembangan UMKM	1.599.999.700	487.362.000	30.5	
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR				88.8	TOTAL PER SASARAN	1.649.999.500	528.266.600	32.02	
TINGKAT <u>EFISIENSI</u> 67.98 %											
TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u> 32.02 %											

Berdasarkan tabel 3.22 menunjukkan penilaian rata-rata capaian indikator dalam menunjang sasaran Lima (5) adalah 32.02%, yaitu kriteria penilaian realisasi kinerja yang tergolong rendah. Artinya pencapaian/realisasi kinerja capaian tidak memenuhi persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Penilaian rata-rata capaian indikator dalam menunjang sasaran kelima (5) dengan Tingkat efisiensi 67.98% dan Tingkat Efektifitas 32.02%.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Berkembangnya Usaha Mikro Kecil Menengah, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Melaksanakan berbagai pelatihan, seminar dan workshop guna meningkatkan pengetahuan, inovasi dan kreasi bagi UMKM
2. Mengusulkan diadakannya tenaga penyuluh bagi UMKM di Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Mempercepat kegiatan pelatihan UMKM sehingga target dapat dicapai pada akhir tahun

Foto-foto Kegiatan UMKM Bidang Koperasi dan UMKM

Pembukaan Pelatihan UMKM oleh Bupati Kepulauan Meranti



Pembinaan Bagi Pelaku UMKM



3.4. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2019	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
URUSAN PERDAGANGAN			
1	Perlu segera dilakukan berbagai upaya dan pendekatan dalam menyelesaikan persoalan sengketa lahan Pasar Modern Selatpanjang dengan pihak Pelindo	1. Kami sudah menyurati pihak Pelindo terkait sengketa lahan pasar modern. 2. Kami akan segera mengadakan rapat internal antara Pemerintah Daerah dan pihak Pelindo	Sampai saat ini belum ada penyelesaian
URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
1	Perlunya membuat program kegiatan dan penganggaran secara optimal/efisien dibidang Koperasi dan 18 Laporan Akhir Panitia Khusus I Pembahasan LKPJ Kepala Daerah T.A. 2020 pengembangan UMKM sebagai salah satu upaya pemulihan ekonomi masyarakat terdampak Covid 19	- Melaksanakan pelatihan untuk memberdayakan dan pengembangan UMKM	Masalah sudah selesai dengan dilaksanakannya pelatihan UMKM
BELANJA DAERAH			
1	Kepada Dinas Perdagangan Perindustrian koperasi dan UKM untuk dapat mengevaluasi program dan kegiatan yang lebih efisien dan optimal dengan skala	Kami telah melaksanakan pelaksanaan kegiatan yang lebih efisien dan optimal dengan skala prioritas mengutamakan kepentingan masyarakat, dengan melaksanakan rapat koordinasi lingkup OPD tentang perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	

prioritas mengutamakan kepentingan masyarakat.	yang langsung bersentuhan ke masyarakat seperti kegiatan : 1. Pelaksanaan kegiatan pelatihan bagi pelaku UMKM. 2. Pemberian bantuan peralatan bagi pelaku industri kecil dan menengah. Kami juga melaksanakan kegiatan pembinaan koperasi yang bertujuan untuk mewujudkan koperasi sehat. Dengan bentuk kegiatan: 1. Pengawasan Kesehatan koperasi. 2. Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan.	
--	---	--

3.5. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2021 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Meranti, DPA Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar **Rp. 12.906.890.659,-** sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp. 10.009.791.533,-** atau dengan serapan dana APBD dan APBN mencapai 78%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2021 kondisi anggaran Silpa **Rp. 2.897.099.126,-**.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan

Meranti pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.23
Pagu dan Realisasi Anggaran
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun 2021

No.	Misi	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
-----	------	---------------	--------------------	---

1.	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana IKM, UMKM, perdagangan dan Metrologi	716.459.782	633.692.850	88.45
2.	Mewujudkan kemandirian industri kecil dan menengah serta menumbuhkan wirausaha baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi lokal dengan penerapan teknologi tepat guna.	5.232.637.630	4.394.241.636	83.97
3.	Meningkatkan tata kelola koperasi serta UMKM.	1.742.431.100	619.872.900	35.58
4.	Meningkatkan Pelayanan Pemerintahan yang Baik	5.215.362.147	4.361.984.147	83.64
	Jumlah	12.906.890.659	10.009.791.533	78

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan dan dicapai oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2021. Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi dengan nilai **Baik**.

Laporan Realisasi Anggaran dan Capaian Program / Kegiatan
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021

No	Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran		Keterangan
					5	6	7	8	9=(7/5)* 100%	10=(8/6))*100%	
1	2	3	4	0	Nilai	Rp	Nilai	Rp	Nilai	Rp	11
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/ Kota		Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	%	100%	5,215,362,147	83.64	4,361,984,147	87	83.64	
1.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah				1						
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	Kegiatan		70,000,000	1	70,000,000	100	100.00	
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dibayar Pajak	Unit	44	51,497,000	44	39,593,600	100	76.89	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				43						
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	Orang		3,449,322,569	43	2,990,025,857	100	86.68	
1.3	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3						
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisari Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan realisasi kinerja SKPD yang dibuat	Dokumen		34,999,850	3	34,999,850	100	100.00	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1						
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	Jenis		13,999,500	1	13,999,500	100	100.00	

No	Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran		Keterangan
1	2	3	4	0	5	6	7	8	9=(7/5)* 100%	10=(8/6) *100%	11
					Nilai	Rp	Nilai	Rp	Nilai	Rp	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Peralatan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kegiatan	1	129,996,400	1	129,784,650	100	99.84	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	kali	100	325,978,000	64	196,794,046	64	60.37	
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
		Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Gedung	1	89,460,000	1	9,460,000	100	10.57	
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Listrik dan Internet Kantor yang dibayarkan	Rekening	1	281,033,028	1	205,926,644	100	73.27	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pengelola Pelayanan Umum Kantor Yang dibayarkan	orang	87	769,075,800	86	671,400,000	98.851	87.30	
2	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi		Persentase Koperasi Aktif		100%	92,431,600	99.11	91,606,300	99,25	99.11	
2.1	Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota										
		Pengawasan, kekuatan kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang mendapat pemeriksaan dan pengawasan	Kelembagaan	1	49,854,350	1	49,854,350	100	100.00	

No	Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran		Keterangan
1	2	3	4	0	5	6	7	8	9=(7/5)* 100%	10=(8/6))*100%	11
					Nilai	Rp	Nilai	Rp	Nilai	Rp	
		Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang mendapat pemeriksaan terhadap peraturan perundang-undangan	Kelembagaan	150	42,577,250	150	41,751,950	100	98.06	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) yang diberdayakan		100%	49,999,800	81.81	40,904,600	97,75	81.81	
3.1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan										
		Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UKM yang mendapat pemberdayaan	orang	50	49,999,800	50	40,904,600	100	81.81	
4	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Persentase Jumlah UMKM Yang Berkembang		100%	1,599,999,700	30.46	487,362,000	95,90	30.46	
4.1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil										
		Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi agar berkembang menjadi usaha kecil	Orang	150	1,599,999,700	150	487,362,000	100	30.46	
5	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Persentase Peningkatan Sarana Perdagangan		100%	369,278,050	91.23	336,884,450	93,04	91.23	

No	Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran		Keterangan
1	2	3	4	0	5	6	7	8	9=(7/5)* 100%	10=(8/6) *100%	11
					Nilai	Rp	Nilai	Rp	Nilai	Rp	
5.1	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya										
		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah pembinaan dan pengendalian pengelola sarana Distribusi perdagangan	orang	21	369,278,050	21	336,884,450	100	91.23	
6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase Perlindungan Konsumen yang Terstandarisasi		100%	126,024,932	82.04	103,386,900	99,18	82.04	
6.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan										
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Jumlah UTP yang di Tera/Tera Ulang	Unit	1958	126,024,932	1958	103,386,900	100	82.04	
7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		100%	221,156,800	87.46	193,421,500	47,21	87.46	
7.1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri										
		Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Kegiatan	1	221,156,800	1	193421500	100	87.46	
8	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Indeks Perencanaan dan Pembangunan Industri		100%	5,232,637,630	83.98	4,394,241,636	88,92	83.98	
8.1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota										

No	Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran		Keterangan
1	2	3	4	0	5	6	7	8	9=(7/5)* 100%	10=(8/6) *100%	11
					Nilai	Rp	Nilai	Rp	Nilai	Rp	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah sarana prasarana industri yang dibangun	Gedung	5	70,126,000	5	63,576,000	100	90.66	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah barang yang diberikan kepada masyarakat	Paket	1	5,162,511,630	1	4,330,665,636	100	83.89	
Total						12,906,890,659		10,009,791,533			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)									77.55	53.31	

Selatpanjang, 04 Januari 2021.

**Plt. Kepala Dinas Perdagangan
Perindustrian Koperasi dan UKM
Kabupaten Kepulauan Meranti,**

**MARWAN, SE
Penata Tk. I
NIP. 19690808 199403 1 006**

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKj IP) yang tersusun ini merupakan pertanggungjawaban Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Rencana Kinerja selama Tahun 2021. Laporan ini juga dapat dipakai sebagai sarana pengambilan keputusan dalam melakukan intropeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dan atau peningkatan kinerja dimasa-masa mendatang.